BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam kumpulan *Peacekeeping English Project (PEP) journal* yang dikeluarkan oleh *British Council* yang salah satunya berjudul *"Managing the Whole Wide World of PEP*, Esther Hay (2008: 1-2) mengungkapkan bahwa setelah dia mengambil alih sebagai manager umum dari program English for Peacekeeping pada Januari 2008, dia telah melihat bahwa program *Peacekeeping English Project (PEP)* ini telah menjadi suatu proyek global dan telah tumbuh dan berkembang di banyak wilayah. Salah satu dari aspek yang paling memuaskan adalah peningkatan dari guru-guru lokal dan guru yang sedang bekerja dalam program ini ataupun mantan guru dari bekas negara *Peacekeeping English Project (PEP)*. Mereka adalah aset yang berharga dan berpengalaman dalam negeri untuk membantu rekan-rekan guru yang lain, dan membantu teman guru yang lain untuk membuat kaderisasi di daerah-daerah PEP tersebut.

Selanjutnya, Esther Hay (2008: 1-2) juga menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan guru-guru dalam program ini telah sesuai dengan kualifikasi pendidikan di Inggris dimana banyak negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai ujian tolok ukur untuk staf dan mahasiswa dan meningkatnya jumlah guru mengambil kualifikasi profesional seperti Pengajaran Tes Pengetahuan (TKT), Sertifikat Pengajaran Bahasa Inggris ke Dewasa (CELTA) dan Sertifikat in-service di Pengajaran Bahasa Inggris (ICELT).

Teknologi baru dalam program *Peacekeeping English Project (PEP)* ini telah memungkinkan guru-guru untuk memenuhi kebutuhan personil yang tidak bisa menghadiri program reguler, sementara juga menyediakan sumber daya tambahan untuk siswa pada program reguler, yang akan digunakan melalui pusat akses belajar sendiri. Hal ini menyebabkan perkembangan *'Peacekeeper'* belajar sendiri secara online atau dengan bahan CD-ROM.

Dalam jurnal tersebut, Esther menyimpulkan bahwa bagian yang paling berharga dari perkerjaan ini adalah melihat bagaimana hasil dan manfaat dari program *Peacekeeping English Project (PEP)* diproyek banyak negara. Dengan bertemu banyak murid, guru, dan personel militer dari berbagai negara, institusi pendidikan dan organisasi lain, Esther berharap bisa mendengar pengalaman mereka, melihat kegiatan pelatihan dan mengerti bagaimana fasilitas yang didanai oleh *Peacekeeping English Project* (PEP) (seperti pusat studi mandiri) dapat benar-benar membuat perbedaan dalan proses belajar mengajar bahasa Inggris. Investasi pada manusia dengan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dan membuat mereka mampu membangun hubungan sebagai guru dan murid adalah hal yang paling penting dari program ini.

Dalam Jurnal yang diterbitkan *"Defense & Security Analysis"* yang berjudul *"Problems Plaguing the African Union Peacekeeping Forces"* oleh Major Robert L. Feldman (2008: 267-279), Feldman menyatakan pandangannya tentang kesulitan yang dialami pasukan operasi PBB yaitu salah satunya adalah kendala bahasa. Seperti kita ketahui di benua Afrika terdiri dari berbagai suku dan etnis dan bahasa yang diperkirakan mencapai 2000 macam dialek.

Para komandan militer mungkin menemukan diri mereka tidak hanya mengalami kesulitan berkomunikasi dengan rekan-rekan mereka dari negara lain, tetapi juga bahkan dengan mereka sendiri tentara, karena banyak negara-negara Afrika individu memiliki banyak bahasa yang dituturkan dalam perbatasan mereka. Nigeria, seperti misalnya, memiliki 510 macam bahasa lokal.

Feldman (2008: 267-279) lebih lanjut menjelaskan bahwa akan ada kesulitan yang melekat dalam upaya untuk menciptakan kekuatan kohesif dari negara dengan populasi yang berbeda. Haruskah militer suatu negara memilih hanya tentara yang berbicara bahasa yang sama, banyak orang lain akan kehilangan haknya, yang dapat menyebabkan perpecahan internal. Di sisi lain, biaya akan terkuras ketika suatu negara harus melatih dan mengintegrasikan kekuatan militer dengan personel dari latar belakang bahasa yang berbeda. Lalu fungsi bahasa disini akan menjadi salah satu penghambat komunikasi antara bangsa-bangsa yang secara sukarela untuk misi penjaga perdamaian, serta prajurit dari berbagai etnis di masing-masing negara. Akan berbeda halnya dengan NATO, dimana bahasa Inggris dan bahasa Prancis adalah bahasa resmi dan banyak personel menguasai dwi-bahasa. Masalah bahasa diperparah oleh buta huruf yang terkenal tinggi di banyak negara-negara Afrika. Beberapa prajurit akan sulit atau tidak mungkin untuk memahami petunjuk manual dan perintah tertulis.

Dari dua pandangan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa Inggris memiliki peranan yang sangat penting dalam operasi perdamaian PBB. Pelatihan bahasa Inggris ini diharapkan terlaksana dengan tujuan agar setiap anggota pasukan perdamaian yang mengikuti program ini dapat menguasai bahasa Inggris

dalam waktu yang telah ditetapkan, dan pada gilirannya diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan pasukan perdamaian PBB untuk dapat berkomunikasi dengan warga setempat dengan menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Bila tujuan program pelatihan ini berhasil, maka komunikasi yang efektif antara prajurit penjaga perdamaian dengan sesame anggota ataupun warga setempat diharapkan dapat tercipta dengan baik dan menunjang keberhasilan misi yang akan dijalankan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Internasional

Salah satu pembahasan dalam memaparkan berbagai hubungan yang terjadi di dunia ini adalah hubungan internasional, yaitu dengan mempelajari manusia dan kebudayaan yang berbagai masyarakat diseluruh dunia.

Hubungan internasional adalah kunci utama negara atau dasar–dasar negara sebagai dari salah satu bagian dari interaksi negara-negara dalam dunia internasional, dimana negara sebagai aktor utama.

Menurut Robert Jackson & George Sorenson dalam buku "Pengantar Studi Hubungan Internasional", mengemukakan bahwa:

> "Alasan utama mengapa kita harus mempelajari hubungan interasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global" (2005:3).

Dari pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwa hubungan internasional merupakan suatu kebutuhan yang harus di pelajari dan dipahami, karena kebutuhannya sangatlah komplek pada dewasa ini dengan frekuensi yang tinggi.

Menurut Holsti yang dikutip oleh T. May Rudy dalam buku "Administrasi dan Organisasi Internasional", dinyatakan bahwa:

> "Pola interaksi Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara-negara (*state-actors*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*)" (2003:2).

Suatu interaksi dilakukan karena adanya saling membutuhkan diantara negara-negara tersebut. Melalui interaksi ini, akan terjalin suatu pola hubungan yaitu hubungan internasional. Pola hubungan atau interaksi tersebut dapat berupa kerjasama, persaingan dan pertentangan. Tentunya dalam berlangsungnya hubungan internasional yang diharapkan adalah berlangsungnya pola-pola kerjasama.

Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdepedensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.

Hubungan internasional pada masa lampau berfokus pada kajian mengenai perang dan damai serta kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara atau antar bangsa dalam konteks sistem global tetapi masih bertitik berat kepada hubungan politik yang lazim disebut "*high politics*".

Sedangkan hubungan internasional sekarang ini selain tidak lagi hanya memfokuskan perhatian dan kajiannya kepada hubungan politik yang berlangsung antar negara atau antar bangsa yang ruang lingkupnya melintasi batas-batas wilayah negara, juga telah mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara (*non-state actors*).

Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hamkam, dan sebagainya. Hubungan Internasional saat ini telah memasuki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup semua hal lintas batas nasional dari semua aspek kehidupan manusia, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan mengenai definisi Hubungan Internasional menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" mendefinisikan Hubungan Internasional adalah:

> "Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu" (2005:4)

Sebagai salah satu bidang kaji keilmuan sosial-politik, Hubungan Internasional tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat internasional. Bidang kaji ini dikenal memiliki cakupan kajian yang cukup luas serta memilik keterkaitan dengan bidang kaji lain, seperti hukum, ekonomi, sosiologi maupun studi budaya. Dengan kata lain, bidang kaji Hubungan Internasional ini bersifat *multi-dimensional* yang terdiri dari berbagai aspek tujuan

juga melibatkan beberapa aktor didalamnya (Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Marty Natalegawa).

Karena sifatnya yang demikianlah kajian hubungan internasional dapat menerima dan membahas tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat internasional, hal ini juga berdasarkan pada suatu kondisi tertentu yaitu melibatkan peran-peran negara atau sering disebut bersifat “inter-nation” dalam sebuah dinamika sistem internasional (Mingst, 2003 : 83).

Pada dasarnya, hubungan Internasional mengacu pada seluruh bentuk interaksi hubungan antar negara. Hubungan yang terjadi di antara negara-negara tersebut dapat merupakan suatu hubungan kerjasama atau merupakan hubungan yang ditandai dengan konflik atau persaingan. Setiap negara akan melakukan interaksi dengan negara lainnya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya dan mencapai suatu kepentingan bersama. Interaksi yang terjadi antar negara tersebut didasari oleh adanya keterbatasan dari tiap negara dalam upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan nasional mereka.

Seperti yang diungkapkan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*:

> "Tujuan studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik, serta interaksi dalam organisasi internasional“ (Perwita dan Yani, 2005: 4-5).

Dengan demikian hubungan internasional merupakan suatu bentuk interaksi prilaku baik antar Negara, Kelompok, maupun Individu dalam berbagai macam karateristik.

Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut, maka beberapa negara membentuk suatu Kerjasama Internasional.

> "Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita dan Yani, 2005: 33)".

Melalui kerangka kerjasama antar negara diharapkan masing-masing pihak dapat saling melengkapi atau bahkan saling menutupi kekuranganya. Berdasarkan pengertian diatas maka suatu kerjasama membutuhkan kerjasama yang saling melengkapi antara dua negara maupun lebih.

2.2.2. Kerjasama Internasional

Dalam sebuah pemerintahan suatu negara, tidak ada sebuah negara yang mampu menjalankan negaranya tanpa membutuhkan negara lain. Oleh karena itu, terjadilah kerjasama-kerjasama antara 2 (dua) negara atau lebih dan dalam hubungan internasional dikenal dengan kerjasama internasional.

Di dalam suatu kerjasama internasional ini bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Kepentingan nasional suatu negara secara khusus merupakan unsur-unsur yang paling penting, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi.

Sejak awal, fokus dari hubungan internasional mempelajari penyebab-penyebab konflik dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama-kerjasama yang dapat tercipta sebagai akibat dari adanya penyesuaian-penyesuaian prilaku

oleh para aktor dalam rangka merespon dan mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lainnya.

Menurut James Menurut Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" tentang kerjasama internasional yaitu:

> "Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam Hubungan Internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauhmana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan yang unilateral dan kompentitif" (Perwita & Yani, 2005:3-4).

Saat ini, sebagian besar transaksi dan interaksi antar negara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, ataupun global yang bermunculan memerlukan perhatian dari berbagai pihak.

Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mangajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu, dan mengakhiri perundingan dengan membentuk suatu perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak, proses seperti ini biasa disebut kerjasama.

Menurut Anak Agung Banyu Perwita & Yayan Mochamad Yani dalam bukunya "Pengantar Hubungan Internasional", mengemukakan bahwa:

> "Kerjasama Internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang

> beraekaragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai macam masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional" (2005:34).

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi langsung diantara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama secara bersamaan.

Bentuk kerjasama lainnya dilakukan antara negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional. Menurut T. May Rudy dalam buku "Administrasi dan Organisasi Internasional" ada 2 (dua) bentuk dan pola kerjasama, yaitu:

1. Kerjasama Pertahanan-Keamanan (*Collective Security*)
2. Kerjasama Fungsional (*Functional Co-operation*) (2009:8).

Sedangkan menurut Anak Agung Banyu Perwita & Yayan Mochamad Yani dalam bukunya "Pengantar Hubungan Internasional", mengemukakan bahwa kerjasama internasional adalah:

> "Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 34)".

Isu utama dari kerjasama internasional yaitu sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral yang kompetitif. Dengan kata lain, kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi

berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan.

Peneliti menyimpulkan bahwa kerjasama internasional adalah salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama dan juga merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, sehingga kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak sangatlah penting.

2.2.3. Kerjasama Bilateral

Menurut Muhammad Iqbal Fadillah dalam tulisannya "Prospek Hubungan Bilateral Indonesia dan Amerika: Membangun Saling Pengertian". Fadillah mengemukakan bahwa :

> Kerjasama bilateral adalah adalah suatu kerjasama antara dua negara dalam bidang-bidang tertentu, misalnya kerjasama bilateral Indonesia dengan Malaysia dalam bidang ketenagakerjaan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU). Kerjasama bilateral dua negara juga mempunyai prinsip yang saling menguntungkan, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain dalam langkah pengambilan kebijakan dinegaranya masing-masing (2005:1).

Bilateralisme mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara, contohnya:

1. Penandatanganan atau perjanjian
2. Tukar menukar Duta Besar

3. Kunjungan kenegaraan

Pada berbagai bentuk hubungan bilateral terdapat situasi ketika keberadaan dan fungsi kedutaan besar tidak dapat dipertahankan. Keputusan formal untuk menutup Kedutaan Besar terjadi ketika timbul masalah dengan satu atau lebih negara (Djelantik, 2008: 85-87).

Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama politik, budaya dan ekonomi di antara 2 negara. Kebanyakan kerjasama internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah kerjasama multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri *(freewill)*.

> "Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002:15-16).

Perjanjian bilateral bersifat khusus (*treaty contract*) karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Oleh karena itu, perjanjian bilateral bersifat tertutup. Artinya tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut.

Menurut T. May Rudy dalam buku "Study Strategis : Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin", mengatakan bahwa :

> "Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut. Tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah negara akan merumuskan sebuah kebijakan.

> Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang di tuangkan dalam kepentingan nasional" (2002:27).

Menurut Perwita dan Yani, Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya timbal balik antara dua pihak. Rangkaian pola hubungan aksi reaksi ini meliputi proses sebagai berikut :

1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
2. Presepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Respon atau aksi timbal balik dari negara penerima.
4. Persepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa. (2005:42)

Dapat dikatakan bahwa hubungan bilateral merupakan perjanjian yang meliputi didalamnya terlibat dua negara yang membicarakan kelanjutan masa depan dari hubungan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Hubungan bilateral terjadi diantara *state-to-state*, dimana yang didalamnya terdapat pula aktor-aktor negara sebagai pelanan pembuat keputusan.

Pada dasarnya, bilateralisme adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara (pemerintahan) yang memiliki kepentingan dalam peningkatan atas beberapa aspek mayor seperti ekonomi, politik, dan pertahanan. Kelebihan dari kerjasama bilateral adalah yang pertama kerjasama ini cenderung mudah dilakukan karena yang terlibat hanya 2 (dua) negara dan aturan tidak begitu

kompleks. Yang kedua bagi negara besar, dengan adanya konsep kerjasama bilateral ini dapat menekan negara dari lawan kerjasamanya untuk mematuhi dan mengikuti aturan yang telah disepakati.

Kemudian yang ketiga adalah kalkulasi dan pencapaian pertimbangan tidak begitu rumit. Kerjasama bilateral dan multilateral disebabkan oleh banyak faktor, misalnya faktor geografis, faktor kesamaan kepentingan dan kesamaan permasalahan. Kedua negara menganggap bahwa melalui kerjasama dapat meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan (*win-win solution*), baik disisi ekonomi, ekonomi pembangunan dan lain sebagainya. Namun kerjasama bilateral memiliki kelemahan, yaitu ketika ada sekian banyak negara yang memimiliki kepentingan yang sama kerjasama bilateralisme tidak akan efektif karena tiap negara harus *deal* satu per satu.

2.2.4 Politik Luar Negeri

Menjalin suatu interaksi antar negara tidak lepas dari politik luar negeri, dimana pada hakekatnya politik luar negeri bertujuan untuk meraih national interest yang ingin dicapai oleh suatu negara diluar batas negaranya. Kepentingan nasional merupakan suatu nilai-nilai yang hendak dicapai, diperjuangkan dan dipertahankan oleh suatu negara itu dalam dunia internasional. Dalam pelaksanaannya politik luar negeri dilakukan oleh aparat pemerintahan. Disamping aparat pemerintahan, kekuatan-kekuatan sosial politik lain seperti partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan turut pula mempengaruhi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri.

Politik luar negeri diungkapkan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional sebagai berikut:

> "politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan "*action theory*", atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional" (2005: 47).

Didalam hubungan internasional politik luar negeri merupakan alat yang dilakukan oleh suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya yang merupakan negara lain dalam mencapai, memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya.

Politik luar negeri pada dasarnya digunakan untuk memahami tingkah laku atau tindakan suatau negara. Dalam merencanakan politik luar negerinya, suatu negara bukan saja melihat tujuan yang ada dilingkungannya yang dapat mempengaruhi pembentukan politik luar negeri (Rudy, 1993:75).

Perubahan-perubahan di dalam politik luar negeri sering terjadi ketika perkembangan-perkembangan di lingkup internal makin meningkatkan tuntutannya berkenaan dengan kondisi di lingkungan eksternal, atau ketika perkembangan di lingkungan eksternal dianggap mempunyai potensi ancaman bagi keberadaan negara bangsa tersebut. Akhirnya kondisi tekanan dari kedua lingkungan tersebut diproses di dalam benak para pembuat keputusan yang bertindak untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang-peluang

didasarkan pada persepsi para pembuat keputusan mengenai kondisi lingkungan di sekitar mereka (Perwita, 2005:68).

Politik luar negeri (*foreign policy*) adalah merupakan serangkaian atau seperangkat kebijaksanaan dari suatu negara dalam interaksinya atau pergaulannya dengan masyarakat dunia yang kesemuanya didasarkan serta untuk memenuhi kepentingan nasional.

Secara rasional, setiap pemerintah akan mengidentifikasikan tujuan mereka dan kemudian mengelola cara-cara mencapainya melalui aksi politik atau kebijakan luar negerinya. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk memenuhi paling tidak satu dari sejumlah nilai-nilai sosial, ekonomi, maupun simbolis serta sikap dan persepsi dalam negeri yang telah terbentuk oleh perkembangan sejarah, ideology dan asumsi mengenai hidup yang ideal atau "*the good life*" (Synder, 2008: 228). Secara garis besar nilai-nilai ini dapat disederhanakan menjadi empat macam, yaitu: otonomi, kesejahteraan, dan status / *prestige*. Meski keempat nilai ini universal sejumlah negara mengkin saja memiliki nilai-nilai yang ingin dicapai. Biasanya setiap negara memiliki prioritas berbeda-beda bagi pencapaian nilai tersebut (Synder, 2008: 113-114) .

Bila diuraikan, sebustansi kebijakan politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh (i) faktor-faktor konteks eksternal yang meliputi: struktur system internasional; struktur ekonomi dunia tujuan dan kebijakan negara lain; masalah-masalah global dan regional yang ditimbulkan oleh aktifitas perorangan serta hokum internasional dan opini dunia, (ii) factor-faktor politik domestik yang meliputi berbagai kebutuhan atau kepentingan sosio-ekonomi dan keamanan,

karakter geografis; atribut nasional; struktur pemerintahan ; opini publik; birokrasi; serta pertimbangan etis , (iii) pengaruh persepsi dan perilaku para actor pembuat kebijakan meliputi citra, perilaku, nilai, doktrin, ideologi, analogi, dan bahkan kepribadian.

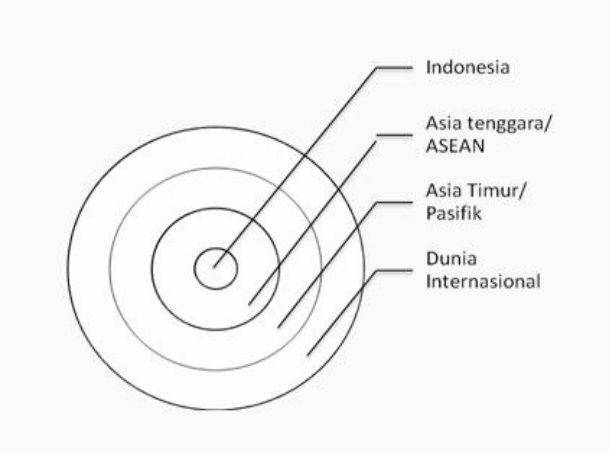
2.2.4.1 Politik Luar Negeri Indonesia

Pada dasarnya politik luar negeri Indonesia senantiasa amat dipengaruhi oleh realitas politik domestik Indonesia. Dilain sisi situasi politik domestik Indonesia juga tidak dapat terlepas dari kondisi politik global. Interaksi yang diciptakan Indonesia dengan negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat harus bersifat kondusif agar tetap dapat memajukan sikap saling pengertian dan menghormati di antara masyarakat bangsa-bangsa. Dalam kaitan ini, masyarakat dunia harus dapat menerima realitas kemajemukan dan kompleksitas Indonesia sebagai daya tarik tersendiri.

Widayanto (2012) menjelaskan bahwa politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi international, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Oleh sebab itu, suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan nasional. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa.

Berangkat dari kondisi real Indonesia, baik ditinjau dari segi geo-politik, geo-ekonomi, dan geo-strategis tadi, Indonesia merumuskan polirik luar negerinya ke dalam rumusan-rumusan yang lebih dikenal dengan istilah lingkaran konsentris.

Gambar 2.1. Lingkaran konsentris Indonesia (Damanik, 2013)



Konsentris pertama menempatkan lingkungan atau kawasan Asia Tenggara. Konsentris berikutnya Asia Pasifik kemudian disusul konsentris dunia internasional secara umum. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan politik luar negeri dan pelaksanaannya sehingga dapat memudahkan pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Selain itu, juga sekaligus untuk dijadikan sebagai syarat antisipasi dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di luar lingkaran Indonesia tersebut, apakah sesuai dengan keinginan Indonesia atau justru sebagai ancaman. Dengan kata lain, perumusan politik luar negeri Indonesia dan implementasinya memperhitungkan korelasi timbal balik antara faktor domestik Indonesia dengan faktor-faktor eksternalnya.

Tujuan politik luar negeri setiap negara adalah mengabdi kepada tujuan nasional negara itu sendiri. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menyatakan:

> ”…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial …”.

Mengenai tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, Moh. Hatta dalam bukunya “Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia” merumuskan empat butir tujuan sebagai berikut: (a) mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, (b) memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat, (c) meningkatkan perdamaian internasional, (d) meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa.

Tujuan politik luar negeri tidak akan terlepas dari hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri merupakan hubungan antarbangsa, baik regional maupun internasional, melalui kerja sama bilateral ataupun multirateral yang ditujukan untuk kepentingan nasional.

Widayanto (2012) menjelaskan beberapa perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dapat ditemui sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada 1995 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian melahirkan Deklarasi Bandung.

2. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu gerakan Non-Blok pada 1961 yang berusaha membantu dunia Internasional untuk meredakan ketegangan perang dingin antara blok Barat dan blok Timur.
3. Indonesia juga aktif dalam merintis dan mengembangkan organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
4. Ikut serta membantu menyelesaikan konflik di Kamboja, perang saudara di Bosnia, pertikaian dan konflik antara pemerintah Filipina dan suku bangsa Moro, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Pada masa Kabinet Indonesia bersatu kemudian merumuskan landasan operasional politik luar negeri Indonesia pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004-2009. Dalam RPJM, ada tiga program utama nasional kebijakan luar negeri yaitu:

1. Pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.
2. Peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan memanfaatkan secara optimal berbagai peluang dalam diplomasi dan kerjasama internasional, terutama kerja sama ASEAN di samping negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dengan Indonesia.
3. Penegasan komitmen perdamaian dunia yang dilakukan dalam rangka membangun dan mengembangkan semangat multilateralisme dalam memecahkan berbagai persoalan keamanan internasional.

Prioritas politik luar negeri Indonesia dalam 5 tahun ke depan dituangkan dalam 3 program utama yaitu program pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia, program peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan untuk memanfaatkan secara optimal berbagai potensi positif yang ada pada forum-forum kerjasama internasional dan program penegasan komitmen terhadap perdamaian dunia.

2.2.5. Kerjasama Pertahanan dalam Hubungan Internasional

Setiap negara di dunia saat awal kemerdekaannya perlu membangun pertahanan agar mampu menjaga wilayah atau kedaulatannya dari gangguan pihak atau negara lain. Dalam hal ini, setiap negara perlu untuk menjalin hubungan dengan negara lain untuk membangun pertahanannya. Atas dasar yang dijelaskan oleh Vandana dalam bukunya *Theory of International Politics*:

> "Melihat kelahiran negara-bangsa baru dan mereka mencari tempat untuk dirinya sendiri di arena internasional, logistik sistem politik internasional menjadi cepat berubah. Banyak negara bangsa belum menetapkan kebijakan jangka panjang mereka, beberapa masalah traumatik selama proses kemerdekaan mereka dan yang lain belum dapat terselesaikan dalam proses emansipasi politik. Sebuah klimaks komunitas negara bangsa belum tercapai. Apa yang akan menjadi paradoks dari sistem politik internasional ketika komunitas klimaks bangsa akan muncul, masalah dan isu, berbagi dan kerjasama ekonomi, pendekatan ramah lingkungan, perdamaian dan keamanan bagi semua dan kepedulian terhadap penegakan hak asasi manusia adalah satu juta dolar pertanyaan. Beberapa waktu sekarang dan beberapa waktu dimasa yang akan dating dan saat ini akan muncul sistem politik internasional yang mendekati kesempurnaan tapi selalu bertanggung jawab terhadap perubahan dari waktu ke waktu "(1996: 49).

Ketergantungan antar negara dalam sistem dunia saat ini, terutama masalah ekonomi dan lingkungan memberikan pengaruh terhadap kebutuhan pertahanan negara dalam hubungan internasional, kerjasama menjadi hal yang

sangat dianjurkan dalam hubungan antar negara tersebut, dinamisasi sistem dunia menyebabkan setiap negara perlu membuat antisipasi dalam menghadapi permasalahan yang akan muncul. Dijelaskan oleh Vandana dalam bukunya *Theory of International Politics* sebagai berikut:

> "... Tapi sekarang saling ketergantungan antar negara, isu-isu keamanan kolektif, perdamaian dan lingkungan telah menjadi sangat penting. Meningkatnya sumber daya alam dipandang memicu konflik dan perang kecil atau besar di masa depan. Secara substansial, eksploitasi sumber daya lingkungan dapat bekerja sebagai faktor yang menentukan masa depan sistem dunia "(1996: 38-39).

Kerjasama untuk menanggulangi kemungkinan yang terjadi menjadi sesuatu yang sangat penting, karena negara-negara di dunia tidak bisa berdiri sendiri dalam membangun pertahanan bagi negaranya. Negara yang memiliki kepentingan terhadap satu negara biasanya bekerjasama secara bilateral, karena apa yang menjadi kepentingan negaranya masing-masing dapat terpenuhi dengan bekerjasama secara bilateral.

Untuk kerjasama pertahanan yang bersifat regional biasanya didasari keinginan untuk menciptakan sarana prasarana yang mendukung setiap angkatan militer negara-negara dalam kawasan tersebut, hal ini menjadikan negara-negara dalam kawasan tersebut memiliki pertahanan yang kuat dalam menjaga kawasannya dari pengaruh yang berasal dari luar kawasan. Kerjasama pertahanan yang bersifat multilateral atau internasional bertujuan untuk saling membantu, bertukar informasi atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat memperkuat pertahanan masing-masing negara.

Dari hal-hal yang disebutkan diatas, kerjasama pertahanan merupakan contoh interaksi dari negara-negara di dunia yang melewati batas-batas negaranya dan mewakili setiap kepentingan dalam hal pertahanan.